

MENAKAR PENGARUH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 TERHADAP PEMBANGUNAN INDONESIA*

Atep AbduRofiq¹

Permalink: <https://www.academia.edu/9997959>

Abstract: *Measuring the Influence of ASEAN Economic Community (AEC) toward Indonesian Development.* The implementation of AEC 2015 brings positive and negative impact. However if it is analyzed from the discrepancy income of developed country, AEC 2015 opens opportunity for domestic and international development. By having clear procedures and professional development, AEC 2015 will face challenges for Indonesian economic development to be better.

Keywords: AEC 2015, development, professionalism

Abstrak: *Menakar Pengaruh MEA 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia.* Pelaksanaan MEA 2015 tidak lepas dari dampak positif dan negatif, namun jika dilihat dari tingkat pendapatan yang belum merata serta kesenjangan dengan negara-negara yang maju di kawasan ASEAN lainnya. MEA 2015 justru memberikan peluang yang positif bagi pembangunan domestik maupun pengembangan internasional, dengan prosedur dan pengembangan profesionalitas yang jelas maka MEA akan mampu merubah tantangan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Kata Kunci: MEA 2015, pembangunan, profesionalitas

* Diterima tanggal naskah diterima: 18 Juni 2014, direvisi: 23 Oktober 2014, disetujui untuk terbit: 11 November 2014.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta.
E-mail: atep.abdurofiq@gmail.com.

Pendahuluan

ASEAN Free trade Area (AFTA)² yang disepakati oleh negara-negara ASEAN pada pertemuan kepala negara ASEAN atau ASEAN *Summit* ke-4 tahun 1992 telah mendorong modernisasi politik dan globalisasi³ diantara negara-negara ASEAN dengan persiapan selama jangka waktu 15 tahun. Namun perjanjian ini direvisi pada tahun 2007 dengan masuknya Cina pada tahun 2012 menjadi ASEAN-China Free trade Area (ACFTA) dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015. Kerjasama ini dilakukan untuk menjadikan kawasan ASEAN menjadi tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global dan menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI) serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN (intra-ASEAN Trade).

Transformasi ini telah mendorong era baru dalam membangun kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat ASEAN. Seluruh masyarakat didorong dalam sebuah integrasi internasional untuk lebih memperluas hubungan dan kerjasama antar bangsa dunia. Pasar bebas merupakan dampak yang mengikuti globalisasi negara-negara ASEAN, dimana masyarakat ASEAN didorong untuk melakukan interaksi dan transaksi secara luas dalam berbagai bidang strategis.

Pelaksanaan ACFTA dan MEA berdampak pada penurunan biaya tarif ekspor-impor menjadi 0-5 persen serta penghapusan batasan kuantitatif dan hambatan non tarif lainnya. Dibukanya ruang-ruang perdagangan bebas dikawasan ASEAN diprediksi mampu mendorong hal positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, *pertama*, mendorong pendapatan negara menalalui ekspor dan impor. *Kedua*, membuka peluang industrialisasi baru di kawasan Indonesia yang sempat lesu karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. *Ketiga*, memperluas lapangan kerja profesional bagi ledakan generasi-generasi muda baru di Indonesia serta memberikan kesempatan berkarir diberbagai wilayah di ASEAN.

Namun pada saat yang bersamaan, kekhawatiran terhadap ekonomi pasar juga menjadi momok yang menakutkan bagi para pengusaha Indonesia, ditengah lemahnya daya saing industri lokal, lemahnya proteksi negara terhadap industri-industri lokal ditakutkan mampu menggerus potensi pengusaha lokal dan beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih kekurangan dalam berbagai aspek ekonomi. Selain itu secara ekonomi, Indonesia tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Kamboja. Namun kegagalan ekonomi pasar lama telah membuka pasar bebas dalam cara pandang baru ekonomi pasar yang dibangun diatas otorisasi negara. Negara menjamin berbagai macam sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan pasar, seperti stabilitas

² AFTA merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk sebuah kawasan bebas perdagangan dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN di dunia.

³ Pengertian globalisasi menurut Barker (2004) adalah koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah ke seluruh dunia dan menciptakan interaksi antar masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

keuangan, keamanan domestik, serta penegakan hukum. Bila dibutuhkan, maka negara juga dapat menggunakan kekuatannya agar pasar dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Lebih jauh lagi, bila tidak terdapat pasar dalam area tersebut yang membutuhkan utilitas seperti tanah, air, listrik, pendidikan, jasa kesehatan, ataupun jaminan sosial. Maka negara harus menyediakan pasar, karena dalam pandangan baru ekonomi pasar, peran negara akan dikurangi secara bertahap dan proporsional untuk menciptakan stabilitas pasar⁴, sehingga peran negara tidak hilang seperti yang dipahami secara konvensional oleh paham ekonomi pasar yang lama, namun ekonomi pasar tetap menganut azas persaingan bebas yang mengharuskan semua pihak berkonsentrasi pada kualitas dan kecepatan dalam membaca kecenderungan pasar dan secara bersamaan negara memberikan proteksi yang mendukung pada dinamisasi pasar yang positif.

Oleh karena itu tulisan ini akan memaparkan sejauh mana politik pasar bebas MEA yang akan diberlakukan pada tahun 2015 mampu memberikan peluang positif dan negatif bagi pembangunan ekonomi Indonesia serta pengaruhnya bagi perluasan industrialisasi dan peluang bisnis-bisnis baru bagi pembangunan Indonesia.

Konsep Masyarakat ASEAN

Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN sejalan dengan dinamika hubungan antar-bangsa di ASEAN yang menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Pada pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 disepakati ASEAN Vision 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan Hanoi Plan of Action (HPA). Visi 2020 termasuk HPA berisi antara lain: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional.

Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turis melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan diantara negara-negara anggota ASEAN.

Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 dihasilkan Bali Concord II yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Terdapat tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan dengan tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2020, yaitu pada bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic Community), dan sosial

⁴ Dag Einar Thorsen And Amund Lie "What is Neoliberalism?". Department of Political Science University of Oslo.
<http://folk.uio.no/daget/what%20is%20NeoLiberalism%20Final.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2014

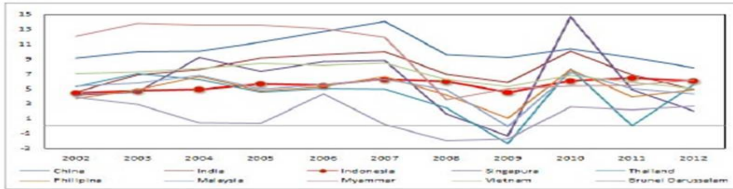
budaya (ASEAN Socio-Culture Community). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 adalah: *"To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020."*

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah AEC Blueprint yang memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyetujui perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015.

Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA 2015

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 dapat dilihat dari perbandingan aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor nasional serta pendapatan perkapita nasional masyarakat Indonesia. Kesiapan Indonesia jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Berdasarkan laporan pertumbuhan ekonomi yang dilansir oleh IMF pada tahun 2012, terlihat bahwa bahwa pada 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran 5,5 persen \pm 1 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11 persen. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu di atas 6 persen dengan pengecualian tahun 2009 (4,6 persen) sejalan dengan krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus. Tren tersebut berbeda bila dibandingkan dengan Singapura yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,55 persen, namun fluktuasinya sangat tinggi mulai dari 14,7 persen (2010) setelah mengalami kontraksi -1,3 persen (2009).

No	Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata2
1	Indonesia	4.5	4.8	5.0	5.7	5.5	6.3	6.0	4.6	6.1	6.5*	6.1*	6.11
2	Singapura	4.2	4.6	9.2	7.4	8.7	8.8	1.7	-1.3	14.7	4.9*	2.1*	6.50
3	Thailand	5.3	7.1	6.3	4.6	5.1	5.0	2.5	-2.3	7.7	0.1*	5.6*	4.70
4	Philippina	3.7	4.9	6.7	4.8	5.3	6.7	4.2	1.1	7.6	4.0*	4.9*	5.39
5	Malaysta	5.4	5.8	6.8	6.0	5.6	6.3	4.9	-1.5	7.2	5.1*	4.4*	5.65
6	Myanmar	12.1	13.8	13.6	13.6	13.1	11.9	3.6	5.1	5.4*	5.5*	6.2*	10.39
7	Vietnam	7.1	7.3	7.8	8.4	8.2	8.5	6.3	5.3	6.8	5.9*	5.1*	7.67
8	Brunei Darussalam	3.9	2.9	0.5	0.4	4.4	0.2	-1.9	-1.7	2.6	2.2*	2.7*	1.62
9	China	9.1	10.0	10.1	11.3	12.7	14.1	0.6	9.2	10.4	9.2*	7.9*	11.36
10	India	4.6	6.9	7.6	9.1	9.6	10.0	7.0	5.9	10.1	6.9*	4.9*	8.26



Sumber: IMF, 2012

Demikian pula halnya dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam yang tidak lepas dari imbas krisis global tahun 2009, sehingga turut mengalami pertumbuhan yang minus. Pertumbuhan ekonomi Vietnam memang menunjukkan tingkat yang selalu lebih tinggi dibandingkan Indonesia dari periode 2002 hingga 2010, namun terlihat mulai mengalami overheating dan melambat pertumbuhannya. Sedangkan Myanmar mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir mirip dengan Indonesia, secara umum pertumbuhan ekonomi masyarakat ASEAN tidak lebih jauh dan lebih tinggi dari pertumbuhan Indonesia, oleh karena itu daya saing Indonesia ditingkat ASEAN masih cukup kuat.

Pertumbuhan ekspor Indonesia secara kolektif sempat mengalami stagnasi terutama pasca krisis ekonomi tahun 1998, nilai ekspor non migas pada tahun 1990-1996 berada pada 16 persen per tahun, sementara setelah krisis moneter ekspor non migas mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3 persen bahkan hingga akhir tahun 2003. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor nasional juga mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2013, pertumbuhan ekspor non migas Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen dibanding November 2013, bila dibandingkan dengan Desember 2012 ekspor mengalami peningkatan sebesar 10,33 persen. Peningkatan ekspor Desember 2013 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 3,09 persen demikian pula ekspor migas naik sebesar 23.07 persen, peningkatan ekspor yang positif memperlihatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ACFTA dan MEA 2015.

Sedangkan berdasarkan pendapatan perkapita nasional terlihat bahwa pendapatan perkapita nasional masyarakat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,8 persen dari tahun 2012, dari 33,5 juta menjadi 36,5 juta. Sepanjang 2013, PDB Indonesia tercatat sebesar Rp. 9.084 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) sedangkan PDB atas dasar harga konstan adalah Rp. 2.770.3 triliun. Untuk kuarta IV 2013 PDB ADHB sebesar Rp. 2.367.9 triliun, dan ADHK sebesar Rp. 699.9 triliun, angka ini naik dibanding kuartal IV 2012, dimana PDB ADHB sebesar Rp. 2.092,4 triliun dan ADHK sebesar Rp. 662.1 triliun. Namun pendapatan perkapita Indonesia yang sebesar US\$4.700 masih jauh jika dibandingkan Thailand yang mencapai kisaran US\$10.000, Malaysia mencapai US\$ 15.000 dan singapura sudah melebihi US\$50.000, keadaan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bermasalah, secara penghasilan masyarakat Indonesia masih kalah dari negara lainnya. Pembukaan ACFTA dan

MEA justeru akan menjadikan migrasi besar-besaran masyarakat Indonesia menjadi pekerja-pekerja negara-negara lain. Secara ekonomi keadaan ini menguntungkan Indonesia dalam pemanfaatan MEA 2015, namun secara jangka panjang, Indonesia akan kehilangan sumberdaya manusia terbaiknya dalam kegiatan pembangunannya. Meskipun demikian, posisi Indonesia masih bisa dikatakan siap untuk menghadapi MEA 2015 dengan pendapatan perkapita yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tantangan MEA 2015 Bagi Indonesia

Dalam beberapa kondisi, perekonomian Indonesia mengalami tantangan dalam menghadapi MEA 2015. Pemberlakuan MEA pada 2015 menjadi sebuah realita yang harus dihadapi oleh berbagai sektor industri, ditengah perbandingan kebutuhan pasar dengan tenaga kerja industri yang terjadi saat ini. Ekonomi nasional saat ini banyak didorong oleh kontribusi industri kreatif dengan melibatkan banyak generasi muda yang memiliki kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga kini telah mencapai 55,2 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis. Per akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto 59,08 persen.

Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97,16 persen atau 107 juta orang. Namun, dengan segala peran strategis itu, hanya 20 persen dari total UMKM yang sudah terakses kredit bank. Usaha kecil menengah yang berkembang itu terdiri dari: (1) Usaha Percetakan, (2) Bisnis *Gadget* dan Pulsa, (3) Waralaba, (4) Bisnis Lewat Media Online (5) Usaha Kuliner (6) Bisnis Fashion (7) Bisnis Otomotif (Reparasi dan Modifikasi) (8) Bisnis Buku Teks Pelajaran. Kendala UMKM diantaranya ditengarai oleh minimnya faktor pemodal, sulitnya perizinan, faktor pasar yang lemah serta minimnya kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

UKM pada dasarnya tahan terhadap arus krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998 karena 4 faktor yaitu: (1) sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, (2) mayoritas UKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, (3) pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4) terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

Pada saat diberlakukannya MEA, UKM belum tentu dapat bertahan dari arus globalisasi yang sangat menekankan persaingan dalam masalah kualitas dan harga. Globalisasi dapat merontokkan pondasi-pondasi usaha kecil menengah dengan sangat cepat, karena psikologi pasar masyarakat Indonesia yang masih lebih senang dengan produk-produk impor. Dengan adanya

perdagangan bebas yang masuk ke Indonesia, membuat pasar dalam negeri menjadi lesu karena masyarakat Indonesia lebih memilih dan suka terhadap produk luar. Dan setiap tahun dampak perdagangan bebas terhadap UKM Indonesia meningkat, hal ini disebabkan masih rendahnya daya saing produk asli Indonesia dibandingkan dengan produk luar yang memiliki kualitas yang bagus.

Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang mengkhawatirkan ACFTA (Asean-China Free Trade Area) karena dinilai akan merugikan produsen dalam negeri yang akan berdampak pada beberapa aspek sosial lainnya seperti banyaknya perusahaan yang akan bangkrut yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, sehingga semakin banyak angkatan penganggur di Indonesia, yang akan membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial di dalam masyarakat seperti kemiskinan dan meningkatnya tindakan kriminal di Indonesia. Perdagangan bebas ASEAN-Cina per 1 Januari 2010 membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

Penutup

Dengan jumlah penduduk 252 juta, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki porsi keuntungan paling besar dengan 50 persen penduduk dari 600 juta penduduk ASEAN. Paling tidak ada 4 (empat) hal yang menjadi fokus dari pelaksanaan MEA, *pertama*, negara-negara di kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. *Kedua*, MEA akan dijadikan sebagai kawasan dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. *Ketiga*, MEA akan dijadikan sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata. *Keempat*, MEA akan diintegrasikan terhadap perkembangan ekonomi yang merata diantara seluruh kawasan ASEAN.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 50 persen dari penduduk ASEAN dan jumlah pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapore dan Thailand, maka MEA 2015 sebenarnya lebih menguntungkan bagi pengembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam pemerataan pendapatan, namun jika pemerataan itu tidak dilakukan dalam waktu yang cepat, Indonesia akan dapat kehilangan sumber daya manusia terbaik yang berpindah tempat untuk mencari kehidupan yang layak di luar Indonesia.

Dari aspek ketenagakerjaan, pembukaan peluang kerja yang luas harus disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat Indonesia. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pengiriman sumber daya manusia dengan kualitas profesionalitas yang rendah hanya akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi "budak" di negara tetangga.

Selain itu dengan pemberlakuan MEA Indonesia dapat menjadi peluang untuk perbaikan ekonomi domestik dengan masuknya investor-investor yang berada di sekitar ASEAN, dengan asumsi bahwa Indonesia

merupakan pasar potensial maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan, apalagi jika disertai dengan kuatnya peran pemerintah dalam menyiapkan insan-insan profesional, maka tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat Indonesia akan meningkat sekaligus. Selain itu masyarakat Indonesia juga dapat meperluas investasi mereka di kawasan-kawasan ASEAN sehingga kemampuan produksi dan ekonomi domestik juga semakin bertambah membaik. Namun, pemerintah juga perlu membatasi dan memproteksi warga negara Indonesia yang akan berpindah mencari pekerjaan di luar Indonesia, jangan sampai mereka minim profesionalitas.

Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Exploitation risk harus diantisipasi dengan melakukan pembatasan-pembatasan regulatif yang bersifat khusus, diantaranya pelarangan warga asing untuk membeli dan memiliki tanah, larangan warga asing untuk mempekerjakan masyarakat lokal kurang dari 60 persen dari jumlah pekerja, larangan untuk membuat industri eksploratif yang dapat mengurangi dan mengganggu batas wilayah Indonesia, serta regulasi-regulasi lainnya yang dapat menciptakan eksploitasi kepentingan publik sehingga MEA 2015 benar-benar menjadi peluang bagi kemajuan ekonomi nasional.

Pustaka Acuan

- Association of Southeast ASIAN Nations (2008). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT. Jakarta. ASEAN Secretariat.
- Fernandes, R.A (2014, Januari). YEARENDER: ASEAN Economic Community to play major role in SEA food Security
- Plummer. M.G. & Yue.C.S (2009). Realizingthe ASEAN Economic Community: A comprehensive Assesment, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Sumber lainnya

- Dag Einar Thorsen And Amund Lie "What is Neoliberalism?".Department of Political Sciencew University of Oslo.[http://folk.uio.n /daget/what%20is%20NeoLiberalism%20Final.pdf](http://folk.uio.no/daget/what%20is%20NeoLiberalism%20Final.pdf). Diakses pada tanggal 6 Maret 2014